

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk dari suatu pembangunan dilihat dari ada tidaknya perubahan didalamnya. Perubahan yang dimaksud adalah dengan adanya pertumbuhan dalam suatu wilayah dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Pembangunan nasional pada dasarnya berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat, dengan tujuan menjadikan masyarakat lebih mandiri, masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Hal ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan yang lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023 dalam website *kilas SDGs* menyampaikan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini merupakan komitmen global dan nasional hasil dari Sidang Umum PBB pada September 2015 yang dideklarasikan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030. 17 tujuan atau *goals* yang perlu dicapai dari SDGs, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam menuju rangka pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan diperlukan berbagai macam strategi pemberdayaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini bertujuan agar pembangunan yang terjadi memiliki kesesuaian dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga, masyarakat dapat ikut andil

dalam melaksanakan pembangunan, karena partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan atau pembentukan program, akan memberikan kedudukan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai konsumen program saja, akan tetapi juga sebagai produsen. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perumusan dan pembuatan program, masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab pada program tersebut, karena merasa adanya kepemilikan dari pembangunan atau program yang dilaksanakan (Utami & Prasetyo, 2020, hlm. 21). Namun, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks di negara berkembang dan dapat menghambat pembangunan yang ada. Salah satu bentuk kemiskinan dapat ditandai dengan banyaknya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan, dimana masyarakat belum mampu mengikuti arus perubahan zaman pada persaingan yang terjadi di era globalisasi ini. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kemandirian masyarakat sangat diperlukan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat bersaing di arus perkembangan zaman globalisasi ini, dengan mengasah, mengembangkan kemampuan, keterampilan atau *skill*, dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai bekal masyarakat dalam mengubah atau meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi (Fitrianesti & Muhtadi, 2022, hlm. 24).

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 12 ayat (2) pemberdayaan dimaksudkan sebagai suatu kegiatan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, ataupun organisasi-organisasi di masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, potensi dan sumber daya, serta pemberian akses dan bantuan dana usaha pada masyarakat dengan harapan dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan di dalamnya.

Pendidikan dan keterampilan juga merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk keberlangsungan pembangunan. Fathulloh et al (2024, hlm. 45) juga menyampaikan bahwa di era banyaknya tantangan globalisasi sekarang ini, indikator keberhasilan kemajuan bangsa indonesia dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Program

pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu pendidikan yang praktis dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sebagai mobilitas peluang kerja dan peluang usaha pada sektor ekonomi atau industri, dengan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait *skill* atau keterampilan kepada masyarakat (Saepudin & Mulyono, 2019 dalam Halawa et al., 2019). Keterampilan disini dimaksud sebagai tolok ukur kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu, seperti dengan menciptakan sebuah inovasi atau karya yang dapat diterima orang banyak. Menurut Zuhri (2019) dalam (Nasihudin & Hariyadin, 2021) Keterampilan dalam mewujudkan sesuatu apapun bentuknya, baik itu bersifat materi maupun non materi, dapat menjadi modal seseorang dengan mudah mencapai tujuan dan impian yang diinginkan.

Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan; Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021; dan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021. Bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang berpegang pada kearifan lokal melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keterampilan) merupakan salah satu *pilot project* pada Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi) yang dibentuk oleh Tim Pendamping PKK dengan fokus untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya bagi kaum perempuan. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan masyarakat desa, begitu pula program ini diterapkan di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten

Ciamis. Dalam program pendidikan dan keterampilan ini, memiliki beberapa program pendukung lainnya, seperti keterampilan membatik, keterampilan anyaman bambu, dan sanggar tari.

Menurut data yang diperoleh dari pemerintahan desa yang di akses pada website desa oleh bidang media, masyarakat Desa Jalatrang berjumlah 2.248 KK dengan penduduk berjumlah 6.608 jiwa/ha yang terdiri dari 3.320 jiwa/ha laki-laki dan 3.288 jiwa/ha perempuan. Dari 6.608 jiwa/ha penduduk, 2.507 jiwa/ha diantaranya hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD/ sederajat, dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Jalatrang tergolong rendah, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dikenyam, akan mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia, baik pada arah pendidikan maupun *skill* dan keterampilan, karena wawasan dan pengetahuan yang diperoleh memudahkan seseorang dalam menerima inovasi baru seiring berkembangnya zaman. Hal ini juga dapat mempermudah seseorang dalam memperoleh dan membuka peluang usaha atau pekerjaannya sendiri. Selain itu, dari rendahnya pendidikan di Desa Jalatrang, 27,5% atau 1817 jiwa/ha dari jumlah penduduk Desa hanya berprofesi dalam mengurus rumah tangga dan rata-rata merupakan perempuan dewasa atau sudah menikah. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat desa, khususnya ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesempatan bekerja dengan baik atau hanya bekerja dengan kemampuan seadanya, seperti membuat pesanan atau menjajakan aneka macam jajanan makanan sederhana, menjualkan kembali barang yang diambil dari orang lain, bahkan tidak sedikit ibu rumah tangga yang membuka bisnis jasa atau menawarkan bentuk pelayanan kepada orang lain, seperti menjadi asisten rumah tangga atau sering disebut dengan pembantu, dimana seseorang melakukan pekerjaan rumah tangga orang lain. Banyak masyarakat desa yang memiliki potensi atau kemampuan yang belum di kembangkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bentuk usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau taraf hidupnya.

Program Rumah Ditan di Desa Jalatrang, dapat menjadi wadah bagi masyarakat sasaran, yaitu Ibu rumah tangga dalam membantu mengembangkan potensi dalam diri masyarakat pada bidang pendidikan dan keterampilan, khususnya pada keterampilan membatik dan menganyam. Dengan begitu,

berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Dilan (Pendidikan Dan Keterampilan) Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti temui, diantaranya:

- 1.2.1 Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada arah Pendidikan dan Keterampilan
- 1.2.2 Sebagian besar masyarakat di Desa Jalatrang berprofesi mengurus rumah tangga
- 1.2.3 Banyak potensi masyarakat yang belum dikembangkan dengan baik

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keterampilan) di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program rumah dilan (pendidikan dan keterampilan) di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak kedepannya. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan yang dapat dijabarkan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk pengembangan teoritis, khususnya dalam kajian masalah program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Masyarakat Sasaran

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat sasaran mengetahui manfaat program rumah dilan dan dapat berpartisipasi aktif pada program tersebut, serta dapat memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk pengembangan program.

1.5.2.2 Bagi Pengelola Program Rumah Dilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan informasi bagi pihak-pihak terkait khususnya pengelola, yaitu TP PKK di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam bentuk evaluasi.

1.5.2.3 Bagi Peneliti

Sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan wawasan peneliti melalui teori-teori dan konsep-konsep yang sudah didapat terkait pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keterampilan).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penafsiran atau istilah-istilah yang ada dalam pembahasan penelitian dan dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan di dalamnya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Batasan istilah sebagai berikut:

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Peneliti mendefinisikan secara operasional Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, dengan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam melalui kegiatan yang memiliki dampak baik kedepannya bagi masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini yaitu program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keterampilan) di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam membantu megembangkan potensi masyarakat yang dibentuk secara terencana dengan masyarakat desa khususnya ibu rumah tangga sebagai sasaran dari pelaksanaanya,

1.6.2 Program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keterampilan)

Peneliti mendefinisikan secara operasional bahwa program Rumah Dilan merupakan *pilot project* dari program Gelari Pelangi yang dibentuk oleh TP PKK Pokja II Pusat pada bidang Pendidikan dan keterampilan. Program Rumah Dilan memiliki beberapa program didalamnya, diantaranya: Keterampilan Membatik, Keterampilan Anyaman Bambu, Dan Sanggar Tari dengan sasaran Ibu rumah tangga di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Program ini masuk kedalam pemberdayaan karena didalamnya terdapat pendidikan, pengembangan, dan pendampingan kepada masyarakat khususnya Ibu rumah tangga yang bertujuan agar masyarakat sasaran dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait Pendidikan dan keterampilan yang sudah disediakan. Selain itu, Dengan adanya program ini juga diharapkan agar masyarakat mempunyai bekal tambahan untuk membuka peluang usaha sendiri dari hasil pelatihan yang ada, khususnya dalam keterampilan membatik dan menganyam.

1.6.3 Keterampilan Masyarakat

Peneliti mendefinisikan secara operasional bahwa keterampilan masyarakat merupakan kemampuan atau pengetahuan seorang individu dalam organisasi atau kelompok sosial tertentu. Keterampilan disini dilihat dari adanya suatu bentuk atau wujud karya yang dihasilkan oleh seorang individu dan diakui oleh banyak orang. Dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan pada program Rumah Dilan, seperti pelatihan membatik dan menganyam, hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengasah atau meningkatkan keterampilannya dalam bidang membatik dan menganyam. Dengan keterampilan yang didapat, masyarakat dapat dengan mudah mencapai tujuan atau *goals* dan impian yang ingin dicapai, seperti membuka peluang usaha baru dalam produksi batik maupun kreasi dalam bentuk anyaman bambu.